

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA***EVALUATION OF THE APPLICATION OF ACCRUAL BASED ACCOUNTING IN THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND THE SPATIAL PLANNING OF SOUTHEAST MINAHASA REGENCY*

Oleh :  
**Hizkia S. Roring<sup>1</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email :  
[1roring.hizkia@gmail.com](mailto:<sup>1</sup>roring.hizkia@gmail.com)

**Abstrak:** Akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan dengan adanya pengawasan dan motivasi dari atasan laporan keuangan yang disusun memperoleh hasil yang lebih baik, dengan adanya sistem pengendalian intern yang mengawasi dan mengarahkan dari pihak *principal* dan *agent* sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya untuk disampaikan dalam penyusunan laporan keuangan, perlu adanya motivasi kerja dalam pembuatan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya dan dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya bagi para penggunanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual. Teknik Pengumpulan data antara lain penyebaran kuesioner, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Saran pada penelitian ini, bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu meningkatkan komitmen, sumber daya manusia serta perangkat pendukung dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang lebih akurat dan jelas, dan perlu menyiapkan staf-staf pegawai yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dalam hal penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan siap dipakai.

**Kata kunci :** *evaluasi, akuntansi berbasis akrual*

**Abstract:** *Accrual-based accounting in the preparation of financial statements with the supervision and motivation of the supervisor of financial statements prepared to obtain better results, with an internal control system that oversees and directs the principal and agent so that they can provide the actual information to be submitted in the preparation financial reports, there is a need for work motivation in preparing financial reports so that local governments can complete financial reports on time and can deliver true information to its users. The method used in this research is descriptive qualitative by describing and analyzing the evaluation of accrual-based accounting applications. Data collection techniques include distributing questionnaires, interviews. The results showed that the implementation of accrual-based accounting at the Department of Public Works in Southeast Minahasa Regency was in accordance with Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Systems (SAP). Suggestions in this study, for the Department of Public Works and Spatial Planning need to increase commitment, human resources and supporting tools in applying accrual-based accounting that is more accurate and clear, and need to prepare staff staff who participate in training / technical guidance in terms of application Accrual-based accounting, so that human resources are more qualified and ready to use.*

**Keywords:** *evaluation, accrual based accounting*

## Latar Belakang

Penggunaan akuntansi berbasis akrual sejatinya bukanlah sesuatu yang baru dalam sektor pemerintahan. Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual sudah diterapkan sejak 40 tahun yang lalu di negara Chili tepatnya pertengahan tahun 1970 pada zaman rezim Pinochet. Namun akuntansi berbasis akrual di Indonesia sendiri baru mulai dicanangkan setelah terbitnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) yang mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kedua undang-undang tersebut diperkuat setelah munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun penerapan akuntansi berbasis akrual pada seluruh entitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia baru berjalan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 seluruh entitas pemerintahan wajib menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Di Indonesia sendiri perjalanan akuntansi akrual mengalami berbagai macam tantangan. Dimulai dari munculnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis *cash toward accrual* atau berbasis kas menuju akrual yang berarti penerapan basis kas untuk pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya munculnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan penerapan akuntansi akrual berbasis akrual secara menyeluruh. Penerapan tersebut selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2015. Namun hingga tahun ini penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia bukan tanpa masalah baik itu di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada level pemerintah pusat di tahun 2014 semester II, hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK menjelaskan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015.

Permasalahan juga terjadi pada level pemerintah daerah yaitu pada semester I tahun 2014 BPK melakukan pemeriksaan atas 184 Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang hasilnya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Permasalahan yang muncul pun sangat beragam yang diantaranya berupa, pemerintah daerah yang belum mempersiapkan SDM yang kompeten, belum dilakukannya pelatihan dan sosialisasi mengenai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara intensif, struktur organisasi yang belum mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah terkait sistem akuntansi yang berbasis akrual, belum adanya alokasi anggaran secara khusus untuk persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang belum terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan belum adanya rencana dari pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.

Permasalahan yang muncul adalah akibat ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tidak segera ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan bagi para satuan kerja (satker) pengelola bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, ketidakseragaman penyajian laporan keuangan Kementerian atau Lembaga (K/L), dan ketidakhandalan data untuk penyusunan laporan keuangan. Permasalahan kedua adalah, penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang tidak berjalan efektif akibat penerapannya yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Akibatnya tujuan pengembangan aplikasi yang terintegrasi antara K/L dan BUN melalui aplikasi SPAN dan aplikasi SAKTI belum tercapai. Permasalahan lainnya adalah, dalam hasil survei terhadap 52 dari 83 KL terdapat 19,23% K/L belum melakukan komunikasi internal terkait rencana penerapan SAP berbasis akrual, 36,53% K/L belum melakukan pemetaan kebutuhan SDM, dan sebanyak 46,15% K/L belum mengalokasikan anggaran khusus.

Uraian diatas menyebabkan penulis tertarik untuk mengevaluasi bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten minahasa tenggara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual serta kendala-kendala apa yang masih dihadapi selama penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

### **Konsep Akuntansi**

Kartikahadi (2014 : 3) mengatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Rantetadung, Palilingan dan Anastasia (2019 : 187) menjelaskan bahwa akuntansi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dan penyediaan jasa, berupa informasi keuangan dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

### **Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Sondakh dan Deddi (2016 : 186) akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang di timbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Adapun akuntansi pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan suatu institusi pemerintahan yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Walaupun seperti yang diketahui sebuah institusi pemerintah berukuran besar, namun dalam perusahaan ia termasuk dalam golongan lembaga mikro (Waworega, dan Kustandi 2018 : 215).

### **Konsep Akuntansi Berbasis Akrua**

Laughin (2013 : 145) mendefinisikan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah sebagai metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat. PP 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **Tantangan Akuntansi Berbasis Akrua**

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

### **Penelitian Terdahulu**

Kristiawati (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah kalimantan barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah sangat tergantung dari dukungan instansi itu sendiri serta komitmen yang kuat dari atasan untuk melakukan perubahan.

Putra dan Aryanto (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Ranuba, Pangemanan dan Pinatik (2015) Analisis kesiapan penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada PDKPA Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPKPA selaku pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah siap terhadap penerapan SAP berbasis akrual hanya saja peran DPKPA masih memiliki hambatan yaitu SDM untuk pengelola keuangan yang ada di setiap SKPD-SKPD tidak memiliki pendidikan dasar di bidang akuntansi.

Sitorus, Kalangi dan Walandouw (2015) Analisis kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, selain itu peran DPPKBMD sebagai SKPKB masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Mayani, Falatehan dan Wahyuni (2018) Strategi peningkatan kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dimana hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan terkait kebijakan, teknologi informasi dan SDM yang mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.

Agyemang dan Yensu (2018) *Accrual-Based International Public Sector Accounting Standards: Implementation Challenges Facing the Metropolitan, Municipal and District Assemblies in the Ashanti Region of Ghana*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel termasuk tingkat pendidikan dan pelatihan akuntansi, tingkat biaya yang berbeda, hukum yang ada, dan dengan pengecualian praktik budaya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan AIPSAS di MMDA di sektor public Ghana.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 – Selesai.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut oleh penulis. Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen dan wawancara. maka kedua teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

Wawancara yang dilakukan berisi 5 pertanyaan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Struktur Birokrasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Data Pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Jumlah Pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Data-data Pimpinan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Metode Analisis

Metode Analisis : berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, maka dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

### Proses Analisis

Setelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis terhadap data yang ada. Untuk melakukan analisis maka digunakan apa yang disebut Proses analisis data. Proses analisis data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder, sehingga data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya, terutama dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dengan demikian, maka perhatian utama dari analisis data ini adalah dari kata, ungkapan, kalimat maupun perilaku dari objek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara (PUPR) merupakan kantor dinas Perkerjaan Umum (PU) untuk wilayah Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertugas sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada di Kecamatan Ratahan tepatnya di Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kelurahan Pasan Lingkungan V. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 30 pegawai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki visi: " Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, jalan dan jembatan, pengairan, didukung oleh peralatan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki misi: (1) meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur menuju Pemerintahan yang baik, (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan dan pemukiman, prasarana jalan, jembatan, sarana air bersih dan peralatan penanggulangan kebakaran, (3) meningkatkan pembinaan jasa kontruksi kepada penyedia barang dan jasa, (4) meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, (5) meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan (6) meminimalisir dampak bencana alam.

### Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini diambil 4 informan, yang terdiri dari Atasan 1 orang atau sebesar 25 %, Pegawai 3 orang atau sebesar 75 %. Pengambilan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengambilan data melalui kuesioner dan pengambilan data melalui wawancara langsung. Pengambilan data melalui kuesioner disebarkan ke 3 informan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pengambilan data melalui wawancara langsung dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu terdiri dari satu orang Atasan dan dua pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum.

### Hasil Wawancara dengan Informan

**Tabel 1. Data Hasil Wawancara dengan Informan Melalui Kuesioner**

Pertanyaan	Hasil Jawaban Informan			
	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Infoman 4
Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik dan lancar? Jelaskan!	Ya. Telah berjalan dengan baik	Ya, sudah berjalan	Sudah, karena sumber daya manusia dan perangkat pendukung tersedia	Ya, berjalan dengan baik dan lancar
Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik dan lancar? Jelaskan!	Ya. Telah berjalan dengan baik	Ya, sudah berjalan	Sudah, karena sumber daya anusia dan perangkat pendukung tersedia	Ya, berjalan dengan baik dan lancar

Apakah dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dapat mempengaruhi komitmen, sumber daya dan perangkat pendukung pada Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara? Jelaskan!	Dapat, karena dapat berpengaruh pada komitmen, sumber daya serta perangkat pendukung dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	Ya, dapat mempengaruhi komitmen, sumber daya dan perangkat pendukung dalam penerapan akuntansi berbasis akrual - Komitmen langsung dari atasan - Sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual - Perangkat pendukung seperti system serta prosedurnya	Dapat, dengan adanya komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung penyimpanan dan penyusunan laporan hanya dapat berjalan dengan baik dan lancar	Ya, karena adanya komitmen, SDM, perangkat pendukung lainnya dapat memperlancar dalam penyusunan suatu laporan
Bagaimanakah Sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara? Jelaskan!	Sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dapat menunjang dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual	Sumber daya manusia yang memahami akuntansi akrual masih minim karena kurangnya pelatihan/Bimtek bahkan sering terjadinya Rolling Staff	Tersedia dan dapat menunjang pelaporan akuntansi berbasis akrual	Telah tersedia dan dapat menunjang suatu pelaporan akuntansi berbasis akrual
Perangkat pendukung apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara? Jelaskan!	Software, dan dokumen	Perangkat pendukung yang mempengaruhi adalah sistem dalam hal ini sistem yang dipakai adalah aplikasi "Simda Keuangan", aplikasi ini digunakan untuk pengelolah keuangan salah satunya meliputi akuntansi dan pelaporannya	Hardware, software serta dokumen/catatan	Perangkat keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), dan perangkat pendukung

*Sumber: Olahan Data, 2019*

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah berjalan dengan baik sesuai dengan komitmen, sumber daya manusia dan perangkat pendukung. Sehingga dengan komitmen, sumber daya

manusia dan perangkat pendukung dapat menunjang laporan keuangan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Tabel 2. Data Hasil Wawancara dengan Informan melalui Wawancara Langsung**

Pertanyaan	Hasil Jawaban Informan			
	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
Bagaimanakah Komitmen Dinas Pekerjaan Umum hubungannya dengan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual?	Harus diterapkan karena merupakan bukti pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang yang dikelola oleh Dinas PU secara transparan kepada masyarakat	Agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berhasil maka perlu meningkatkan komitmen dari tingkat pimpinan sampai bawahan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual	Tetap menjalankan aturan Pemerintah (PP 71 Tahun 2010)	Dalam melaksanakan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual guna melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntanbel dan memberikan dukungan dengan peraturan sarana prasarana serta SDM
Sumber Daya apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum?	Manusia (Kompetensi bidang keuangan) Perangkat TIK	Pelaporan keuangan lebih akurat, menghasilkan kegiatan memenuhi kebutuhan	Manusia	Sumber daya manusia, perangkat pendukung
Bagaimanakah Sumber Daya pada Dinas Pekerjaan Umum hubungannya dengan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual?	Cukup tersedia	Menghasilkan pelaporan akuntansi berbasis akrual lebih jelas melakukan kegiatan sesuai kebutuhan	SDM Dinas PUPR sudah mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual	Tersedia
Bagaimanakah Perangkat Pendukung pada Dinas Pekerjaan Umum hubungannya dengan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual?	Cukup tersedia	Menghasilkan laporan keuangan yang berbasis akrual dan lebih jelas	Cukup tersedia	Perangkat pendukung dinas, pekerjaan umum tersedia dan memadai dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual

Perangkat apa saja yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi berbasis akrual?	Pendukung yang Komputernya, internet, aplikasi Simda, dan Kas on line	Computer, aplikasi Simda, dan Kas on line	Perangkat keras, perangkat lunak	Perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dokumentasi (catatan-catatan yang digunakan untuk proses akuntansi akrual)
--	---	---	----------------------------------	--

**Sumber: Olahan Data, 2019**

Tabel 2 menunjukkan bahwa komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung sangatlah berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual lebih akurat dan jelas.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Sehingga melalui komitmen yang merupakan suatu hubungan individu (pegawai) dengan satuan kerja yang dapat menimbulkan suatu sikap dasar yang dipandang sebagai rasa saling keterikatan antara pegawai dengan organisasinya. Dimana dengan adanya dukungan yang kuat dari pimpinan/atasan akan menjadi kunci keberhasilan dalam suatu perubahan. Komitmen akan menjadi suatu hambatan ketika pegawai publik merasa kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan/atasan untuk melakukan perubahan yakni penerapan akuntansi berbasis akrual. Dimana di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan komitmen dengan baik.

Salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu komitmen dari pimpinan atau atasan yang harus diterapkan dan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan, agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berhasil dan juga merupakan bukti pertanggung jawaban uang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum secara transparan kepada masyarakat serta tetap menjalankan aturan pemerintah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengemukakan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga dalam melaksanakan implementasi akuntansi berbasis akrual guna melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan dukungan dengan peraturan sarana prasarana dan Sumber daya Manusia (Sampel, Kalangi dan Runtu 2015).

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dibanding dengan berbagai sumber daya lainnya, seperti modal, peralatan, teknologi, dan sebagainya. Sumber daya dikatakan paling penting bagi organisasi karena hanya sumber daya manusia yang mampu menggerakkan sumber daya organisasi lainnya, sehingga kegiatan suatu organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia yang mampu menggerakkan keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang berkualitas baik. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan baik pelatihan manajerial maupun teknis fungsional. Dengan demikian sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Pendidikan dan latihan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu adalah sama dengan konsep belajar (Lamonisi 2016).

Sumber daya manusia khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara yang memahami akuntansi berbasis akrual masih minim disebabkan karena kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis bahkan sering terjadinya *Rolling Staff* atau pergantian staf dan Staf khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tersedia dan dapat menunjang dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual.

Perangkat pendukung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara akan sangat dibutuhkan dalam membantu dalam penerapan akuntansi berbasis akrual agar dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini perangkat pendukung yang dimaksud dapat berupa sistem akuntansi berbasis akrual yang terkomputerisasi dan kebijakan akuntansi. Karena dengan adanya perubahan sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih informative sudah tentu harus didukung oleh perangkat pendukungnya yaitu *Hardware* (Perangkat

keras), *Software* (Perangkat Lunak), dan dokumen. Hal ini sangatlah diperlukan dalam menunjang keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, contohnya perangkat lunak yaitu aplikasi Simda Keuangan yang digunakan untuk pengelolah keuangan salah satunya meliputi akuntansi dan pelaporannya (Krisnawati 2015).

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya penerapan akuntansi berbasis akrual sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi kesiapan pegawai publik masih sangat minim untuk sumber daya manusia (staf akuntansi) dengan kualitas yang dibutuhkan dan jarang ada pelatihan atau bimbingan teknis dan sering terjadi *Rolling Staff* atau pergantian staf tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dengan kualitas yang dibutuhkan, begitu pula dengan komitmen dari pimpinan atau atasan dan perangkat pendukungnya dan ini semua juga tidak terlepas dari Kesiapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Dari aspek perangkat pendukung berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa perangkat pendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sudah memadai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari komitmen dari pimpinan, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual secara akurat dan jelas, sehingga akuntansi berbasis akrual tersebut dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas Pemerintah.
5. Dari aspek komitmen, masih kurangnya komitmen dari atasan sehingga perlu dilakukan trik dan inisiatif sendiri dalam mencari informasi mengenai akuntansi berbasis akrual, serta masih kurangnya dukungan yang diberikan seperti pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) dari pihak independen yang memahami akuntansi berbasis akrual.
6. Dari kualitas Sumber daya manusia yang dibutuhkan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual, ini lebih disebabkan sering terjadinya pergantian (*rolling*) pegawai terutama untuk staf akuntansi di setiap SKPD.
7. Dari aspek perangkat pendukung seperti system dan prosedur serta kebijakan akuntansi yang telah mengacu pada akuntansi berbasis akrual.

### Saran

Yang menjadi saran untuk perbaikan manajemen akuntansi, yang merupakan implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu meningkatkan komitmen, sumber daya manusia serta perangkat pendukung dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang lebih akurat dan jelas
2. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyiapkan staf-staf pegawai yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dalam hal penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan siap dipakai

## DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang, J. S., dan Yensu, J. 2018. *Accrual-Based International Public Sektor Accounting Standards: Implementation Challenges Facing the Metropolitan, Municipal and District Assemblies in the Ashanti Region of Ghana*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No.2. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v8i2.12860>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Kartikahadi. 2014. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.

- Kristiawati, E. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi*, Vol. III, No.3. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i3.2771>. Di Akses Pada Tanggal 1 November 2018.
- Lamonisi, S. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592/11188>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Laughin. 2013. Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mayani, N., Falatehan, A. F., dan Wahyuni, E. S. 2018. Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No.1. <http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/viewFile/22708/14976>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Putra, I. W. G. Y. D., dan Ariyanto, D. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11172>. Di Akses Pada Tanggal 9 November 2018.
- Ranuba, E. D. S., Pangemanan, S., dan Pinatik, S 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7118>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Rantetadung, R., Palilingan ., dan Anastasia. 2019. Evaluasi Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 14, No. 01. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/issue/archive>. 29 Januari 2019 (02:55)
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Sampel, I. F., Kalangi, L., dan Runtu, T. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis AkruaI. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7325>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Sitorus, S., Kalangi, L., dan Walandouw, S. K. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7623>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018
- Sondakh, R. F. D., dan Deddi. 2016. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pada Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 11. No. 02. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/issue/archive>. 29 Januari 2019 (03:15)
- Waworega, A. A., dan Kustandi. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No.04. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/issue/archive>. 29 Januari 2019 (03:05)